



BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



BKF

Laporan Tahunan **Layanan Informasi Publik** **Tahun 2023**

Badan Kebijakan Fiskal

Daftar Isi

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	3
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	3
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	3
2. Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik	4
3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik	4
C. Rincian Pelayanan Informasi Publik	5
D. Keberatan dan Sengketa	5
E. Kendala	6
F . Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	6

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan layanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 ditetapkan Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I Badan Kebijakan Fiskal.

Pemberian layanan informasi publik oleh PPID di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. PPID Kementerian Keuangan dan PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan bertanggung jawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas PPID di Lingkungan BKF, telah ditetapkan Kepala Subbagian Publikasi dan Layanan Informasi BKF dan satu Pelaksana Subbagian Publikasi dan Layanan Informasi BKF sebagai anggota Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik sesuai dengan Keputusan Sekretaris

Jenderal Nomor Kep-1/SJ/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2022. Disamping itu, guna memperlancar koordinasi antar unit di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, telah dibentuk Tim Dukungan Layanan Informasi Publik Badan Kebijakan Fiskal melalui diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor Kep-22/KF/2023.

BKF senantiasa berkoordinasi dengan PPID Kementerian Keuangan dalam melakukan pelayanan informasi publik. Koordinasi ini meliputi pembahasan terkait tanggapan permohonan informasi, penyusunan daftar informasi dan klasifikasi informasi serta *sharing knowledge*.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

a. Ruang Layanan Terpadu



BKF memiliki ruang layanan terpadu yang digunakan untuk melayani pemohon informasi publik. Ruangan ini berlokasi di Gedung R.M. Notohamiprodjo Lantai 2 (Jln. Dr Wahidin Raya No.1, Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat).

Layanan Informasi



fiskal.kemenkeu.go.id/ppid

b. QR Code

BKF menyediakan QR Code menuju laman website layanan PPID sehingga memudahkan pemohon informasi publik yang datang langsung ke BKF.

c. Telepon

Pemohon informasi publik dapat menghubungi nomor 021-34833486 untuk menanyakan informasi terkait layanan informasi publik di BKF.

d. Email

Email yang digunakan BKF dalam melakukan pelayanan informasi publik yaitu ppid.bkf@kemenkeu.go.id

e. Sistem Informasi PPID (SIPPID)
Kementerian Keuangan

BKF menggunakan SIPPID terintegrasi yang dapat diakses oleh pemohon informasi publik melalui aplikasi e-PPID atau tautan e-ppid.kemenkeu.go.id

f. Media Sosial

Media sosial BKF yaitu Instagram(@bckfemenkeu), Twitter (@bckfemenkeu), Facebook (Badan Kebijakan Fiskal), dan Youtube (BKF Kemenkeu).

g. Situs

Pemohonan informasi publik dapat mengunjungi situs web BKF pada tautan <https://fiskal.kemenkeu.go.id/ppid> untuk memperoleh informasi terkait layanan informasi PPID BKF. Selain menyediakan layanan informasi melalui jalur PPID, BKF juga menyediakan layanan riset dan wawancara yang dapat diakses melalui situs web BKF pada tautan <https://fiskal.kemenkeu.go.id/layanan/riset-wawancara>.

2. Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan tugasnya di tahun 2023, Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal selaku PPID Tingkat I BKF, dibantu oleh Kepala Bagian Informasi Publik, Kepala Subbagian Publikasi dan Layanan Informasi BKF dan 2 Pelaksana Subbagian Publikasi dan Layanan Informasi BKF. Selain itu, proses pemenuhan permintaan informasi publik juga didukung oleh unit-unit eselon II dan arsiparis di lingkungan BKF.

3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan layanan informasi publik selama tahun 2023 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BKF 2023 dengan Klasifikasi Rincian Output (KRO) Komunikasi Publik.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2023, BKF menerima 5 permohonan informasi melalui layanan informasi PPID. Dari 5 permohonan tersebut, terdapat 2 permohonan yang dikabulkan sepenuhnya, 1 pemohon yang dikabulkan sebagian, dan tidak ada pengajuan keberatan yang diajukan kepada BKF. Rincian pelayanan informasi publik BKF

selama tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Disamping itu, selain menyediakan layanan informasi melalui jalur PPID, BKF juga menyediakan layanan riset dan wawancara. Pada tahun 2023, BKF telah melayani 140 pemohon layanan riset dan wawancara. Topik yang diajukan oleh pemohon riset dan wawancara sebagian besar mengenai kebijakan pendapatan negara.

D. Keberatan dan Sengketa

Sepanjang tahun 2023, tidak ada pengajuan keberatan dan sengketa yang diajukan kepada BKF.

Tabel 1 - Pelayanan Informasi Publik

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan Ditolak	Tidak Diberikan	Keberatan
			Sepenuhnya	Sebagian			
Januari	-	-	-	-	-	-	-
Februari	1	11	1	-	-	-	-
Maret	1	1	-	1	-	-	-
April	1	6	1	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-
Juli	1	8	-	1	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-
September	1	10	1	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-
Total	5	7,2	3	2	-	-	-

E. Kendala

BKF menghadapi kendala dalam mengelola layanan informasi publik selama tahun 2023, yaitu belum meratanya pemahaman atas keterbukaan informasi publik pada unit-unit di lingkungan BKF. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tanggal 20 Oktober 2023, BKF telah melakukan sosialisasi kepada unit-unit di lingkungan BKF guna meningkatkan pemahaman atas keterbukaan informasi publik.

Januari 2024,
Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal
selaku
PPID Tingkat I BKF

Dini Kusumawati

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan dengan memperhatikan kendala pengelolaan pelayanan informasi publik serta hasil monitoring dan evaluasi PPID BKF 2023, disusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan pengumuman secara mandiri untuk data dukung daftar rancangan peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan unit eselon I pada situs web unit eselon I
2. Menyediakan data statistik tersendiri pada situs web unit eselon I untuk data: organisasi; administrasi; kepegawaian; serta pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Melakukan penyesuaian proses bisnis dengan menggunakan dasar hukum terbaru terkait layanan informasi publik.
4. Menyusun surat keputusan terkait pelimpahan kewenangan dalam bentuk mandat untuk menandatangani naskah dinas PPID.